Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi pasti membutuhkan pemerintahan yang baik. Pemerintah yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (https://www.bpk.go.id/2024).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi alat utama untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dan memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, meskipun standar akuntansi telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan adanya penyajian yang disusun dengan baik dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber dana baik dalam penyajian informasi pelaporan finansial, realisasi anggaran dan penilaian kinerja finansial. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013, tentang laporan keuangan pemerintah menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

yang baik harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (https://peraturan.bpk.go.id).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi prinsip keandalan dan relevansi agar dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan produk dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang disusun diakhir periode merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Komponen laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan *Equitas* (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) dimana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang bekualitas harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) hal ini didukung oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (https://dspace.uii.ac.id).

Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah. Setelah menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak langsung dipublikasikan namun, diperiksa terlebih dahulu oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang berkualitas menunjukan bahwa kepala daerah bertanggungjawab dalam mengelola organisasi (https://media.neliti.com).

Kualitas laporan keuangan diberbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir masih sering menjadi sorotan. Badan Pemeriksa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Keuangan (BPK) dalam laporan auditnya sering menemukan permasalahan seperti ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar, lemahnya pengendalian internal hingga kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (https://www.bpk.go.id/2023).

Dalam ruang lingkup tata kelola keuangan pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan memberikan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan layak, serta dapat dipertanggungjawabkan dan mengarahkan kepada penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bisa dikatakan cukup baik. Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di kabupaten Indragiri Hilir merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut (https://www.bpk.go.id/2017).

Dari https://setda.inhilkab.go.id yang berhasil diakses, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Bupati berharap akan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun 2021 yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya. Ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan wajar dan berkualitas.

Dari https://mediacenter.inhilkab.go.id/login yang berhasil diakses, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau pada tanggal 16 Juni 2023. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2022. Artinya, terhitung sejak 2016 sampai dengan 2022 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh (7) tahun berturut-turut.

Dari https://mediacenter.inhilkab.go.id/login yang berhasil diakses, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Riau bertempat di aula kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Riau, jalan sudirman. Sementara itu, kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan mengapresiasi atas penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas kerja kerasnya jajaran Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dapat menyelesaikan tepat pada waktunya, untuk itu diharapkan dengan keberhasilan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh delapan (8) kali

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Riau pada tanggal 22 Mei 2024 menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya, Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan (8) kali berturut-turut sejak 2016 sampai 2023. Tabel opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri hilir dari 2016 sampai 2023, sebagai berikut:

Tabel 1.1: Daftar Opini LKPD Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Tahun	Opini
1	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2020	Wajar Tanpa Pengecualian
6	2021	Wajar Tanpa Pengecualian
7	2022	Wajar Tanpa Pengecualian
8	2023	Wajar Tanpa Pengecualian
9	2024	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: https://ppid.inhilkab.go.id/

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa opini yang diberikan tidak mengalami perubahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2016 sampai 2024 pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali berturut-turut. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa kelemahan terkait pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan (https://ppid.inhilkab.go.id/).

Hal ini telah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah terkait, untuk mendorong pengembangan Sistem Pengendalian Internal yang memadai serta penerapan *Governance, Risk* dan *Compliance.* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap hasil pemeriksaan bermanfaat bagi upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemeriksaan serta sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah (https://riau.bpk.go.id/).

Temuan dari beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan yang dimaksud merujuk pada karakteristik relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman yang menjadi indikator utama dalam penyajian informasi keuangan pemerintah. Oleh

karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kembali secara komprehensif pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir (https://media.neliti.com).

Sistem pengendalian internal yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal yang baik mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2018). Pengendalian internal yang efektif dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan namun, implementasinya sering kali menghadapi kendala seperti, kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait (Arens dkk., 2020). Sistem pengendalian internal menjadi elemen fundamental dalam pengelolaan keuangan pemerintah termasuk pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir (www.bpk.go.id).

Sistem pengendalian internal dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kendala laporan keuangan pemerintah daerah. Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir, kelemahan dalam salah satu atau beberapa komponen dapat mengakibatkan ketidaktepatan pencatatan keuangan seperti, kesalahan klasifikasi anggaran dan kurangnya kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (www.bpk.go.id).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Keterkaitan sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pada Kabupaten Indragiri Hilir yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama delapan (8) tahun berturut turut dari 2016 sampai 2023 yang menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat sistem pengendalian internal. Namun, laporan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) juga masih mencatat kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti kurangnya dokumentasi atas proses pengendalian dan pengawasan (https://media.neliti.com).

Sistem pengendalian internal dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dianalisis melalui lima indikator utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen serta seluruh pegawai terhadap pentingnya pengendalian internal dalam menjalankan tugas pemerintahan (www.bpk.go.id).

Pada beberapa OPD di Kabupaten Indragiri Hilir, masih ditemukan lemahnya komitmen pimpinan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas yang konsisten, yang dapat memengaruhi efektivitas pengendalian. Penilaian risiko belum sepenuhnya dilaksanakan secara sistematis, sehingga potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaporan keuangan sulit diantisipasi lebih awal. Aktivitas pengendalian seperti prosedur otorisasi, verifikasi, dan pemisahan tugas sering kali belum berjalan optimal, mengakibatkan lemahnya sistem pencegahan

dan deteksi kesalahan. Di sisi lain, sistem informasi dan komunikasi internal belum sepenuhnya mendukung aliran informasi yang tepat waktu dan akurat antar unit kerja, yang dapat berdampak pada keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Terakhir, fungsi pemantauan pengendalian internal belum terlaksana secara berkelanjutan, yang menyebabkan ketidaktertiban dalam tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun opini WTP telah diraih, implementasi pengendalian internal secara substansial masih memerlukan perbaikan agar kualitas laporan keuangan benar-benar dapat diandalkan (www.bpk.go.id).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual juga menjadi tantangan. Regulasi yang mengatur standar pelaporan keuangan berbasis akrual di sektor pemerintah pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam konteks tersebut, arah indikator penerapan SAP mencakup tiga aspek penting, yaitu pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Pertama, pencatatan mengacu pada proses sistematis dalam mencatat seluruh transaksi keuangan secara kronologis dan berdasarkan asas akuntansi akrual, yang bertujuan agar seluruh kegiatan keuangan daerah terdokumentasi secara akurat dan andal. Kedua, pengikhtisaran adalah tahapan dalam sistem akuntansi yang menyusun data dari pencatatan transaksi ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan terstruktur, seperti buku besar, neraca saldo, dan laporan periodik lainnya (https://riau.bpk.go.id).

Proses ini sangat menentukan keterbandingan dan keterpahaman informasi keuangan. Ketiga, pelaporan adalah hasil akhir dari sistem akuntansi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

menyajikan laporan keuangan secara komprehensif kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip relevansi, keandalan, dan dapat dibandingkan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, penerapan SAP yang baik melalui tiga indikator ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Banyak daerah, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi kesulitan dalam menghadapi sistem ini baik karena keterbatasan infranstuktur maupun kurangnya pelatihan yang memadai bagi para pengguna sistem tersebut, serta masih ditemukan kesalahan administrasi keuangan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan (https://riau.bpk.go.id).

Kabupaten Indragiri Hilir telah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berbasis akrual, terdapat beberapa hal yang menunjukkan keberhasilan seperti, Kabupaten Indragiri Hilir telah memperoleh opini W ajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik memberikan peningkatan dalam aspek penyajian dan keandalan data keuangan (https://riau.bpk.go.id).

Meskipun laporan keuangan daerah berhasil memperoleh opini WTP secara berturut-turut, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penerapan SAP di tingkat operasional. Masih ditemukan keterlambatan penyusunan laporan dan ketidaksesuaian klasifikasi akun yang dapat mengganggu kualitas informasi keuangan yang disajikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan administratif dalam meraih opini audit belum tentu mencerminkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

penerapan sistem akuntansi yang baik di seluruh OPD. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi harus benar-benar dimaknai sebagai proses berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir laporan, tetapi juga pada keakuratan dan keandalan proses pencatatan serta transparansi informasi yang dihasilkan. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan sistem ini memengaruhi kualitas laporan keuangan secara nyata, bukan hanya dari sisi formalitas semata (https://warta.bpk.go.id).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Pegawai memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup dibidang akuntansi serta keuangan memainkan peran kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas namun, kenyataan bahwa banyak daerah masih menghadapi masalah dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mereka, baik karena keterbatasan anggaran maupun kurangnya program pelatihan berkelanjutan (Serdamayanti, 2017).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan, pengetahuan profesional para pegawai di bidang keuangan, keterampilan teknis sumber daya manusia yang bertugas dalam pengelolaan keuangan. Kabupaten Indragiri Hilir yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya peran sumber daya manusia yang cukup baik dalam penyusunan laporan keuangan karena pegawai keuangan Organisasi Perangkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Daerah (OPD) telah mengikuti pelatihan teknis terkait pengelolaan akuntansi berbasis akrual (https://bkd.inhilkab.go.id/).

Kompetensi sumber daya manusia dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu pengetahuan, keahlian dan perilaku. Pengetahuan mengacu pada pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, regulasi keuangan daerah, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di beberapa OPD Kabupaten Indragiri Hilir, masih ditemukan aparatur yang belum sepenuhnya menguasai aturan teknis penyusunan laporan keuangan, yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan maupun pelaporan. Keahlian mencerminkan kemampuan teknis dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke dalam sistem keuangan daerah, seperti mengoperasikan aplikasi keuangan, menyusun jurnal, serta merekonsiliasi data (https://elibrary.unikom.ac.id).

Kurangnya pelatihan dan pembaruan kompetensi teknis sering kali menjadi kendala dalam memastikan keakuratan data. Sementara itu, perilaku mencakup sikap, etika, dan tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugasnya. Pegawai yang memiliki integritas tinggi akan lebih cermat, teliti, dan taat aturan, yang pada akhirnya mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal dan transparan. Dengan demikian, ketiga indikator ini saling berkaitan dan harus dimiliki secara seimbang agar SDM mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas (https://www.researchgate.net).

Secara keseluruhan, kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh keberhasilan dalam penerapan sistem pengendalian internal dibutuhkan agar mempermudah

dalam menemukan atau menganalisis permasalahan yang ada, sistem akuntansi keuangan daerah yang akuntabel, bersistem dan terorganisir akan mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia dengan integrasi yang baik menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun berturut-turut, kualitas laporan keuangan dari sisi substansi masih menjadi pertanyaan. Hal ini terlihat dari beberapa temuan audit dan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal belum sepenuhnya berjalan efektif, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah masih menghadapi kendala teknis dan administratif, serta kompetensi sumber daya manusia belum merata dalam penguasaan akuntansi pemerintahan. Padahal, kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh keandalan proses pengendalian, akuntabilitas sistem pencatatan, serta kapabilitas aparatur dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan secara tepat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah capaian opini WTP tersebut benar-benar mencerminkan kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, dan sejauh mana ketiga variabel independen tersebut memengaruhi kualitas laporan keuangan secara nyata. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi, dan kompetensi SDM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi tata kelola keuangan pemerintah daerah ke depan.

Dalam penelitian Rahayu & Kanita (2022), dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022)", hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem pengendalian Internal pada OPD berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di OPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 (Rahayu & Dewi Kanita, 2022).

Hal ini menunjukkan tingginya kualitas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan teknologi informasi tidak serta-merta meningkatkan kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan artinya semakin baik sistem pengendalian intern dalam suatu OPD semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, perlunya pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut terkait penerapan akuntansi berbasis akrual dan pemanfaatan teknologi informasi agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan (Rahayu & Kanita, 2022).

Secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah Pada OPD Provinsi DKI Jakarta, hal ini menunjukkan meskipun penerapannya sudah sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

baik, tetapi belum cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tanpa adanya faktor lain yang mendukung. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada OPD Provinsi DKI Jakarta, hal ini menunjukkan meskipun pemanfaatannya tergolong sangat baik, tetapi belum cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan secara langsung ditemukan bahwa kurangnya jadwal pemeliharaan teknologi menjadi kendala dalam optimalisasi sistem. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada OPD Provinsi DKI Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan control dalam pencatatan serta pelaporan keuangan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan (Rahayu & Kanita, 2022).

Dalam penelitian Gustina (2021), dengan judul "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir", hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak hanya dinilai dari efektivitas pengendalian internalnya saja, sehingga aparatur pemerintah harus mampu memenuhi aspek-aspek lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Gustina, 2021).

Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini

menunjukkan bahwa semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi suatu informasi yang disajikan membutuhkan sebuah sistem dalam penyusunannya (Gustina, 2021).

Dalam penelitian Binawati & Nindyaningsih (2022), dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan daerah telah dilakukan dengan baik untuk mendukung dan memaksimalkan sistem (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia telah baik dilakukan sehingga, berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah dilakukan dengan baik, mampu meningkatkan kemampuan dalam pembuatan laporan keuangan keuangan (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah baik dilakukan tetapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Penelitian ini berfokus untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta untuk mengevaluasi pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir.

Variabel sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia ini dipilih karena variabel-variabel ini mempengaruhi sejauh mana kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dijaga terkait dengan transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipilih karena variabel independen yaitu, sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia dan variabel dependen yaitu, kualitas laporan keuangan pemerintah terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang memungkinkan penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan pengelolaan keuangan.

Ketidakkonsistenan atau perbedaan pendapat dari penelitian terdahulu mengenai penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah yang menyatakan variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

independen yaitu, sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan variabel independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan judul **"Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir".**

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan mengenai perumusan masalah yang telah disampaikan, yaitu :

1. Untuk mengetahui secara empiris Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui secara empiris Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui secara empiris Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Untuk mengetahui secara empiris Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk menyelidiki keadaan, alasan, konsekuensi terhadap suatu keadaan tertentu, memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang suatu masalah atau fenomena, baik dalam konteks teori maupun praktik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Penelitian memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memecahkan masalah praktis yang dihadapi (Sugiyono, 2018). Ada dua kategori manfaat penelitian yaitu teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang penelitian yang relevan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir, serta juga diharapkan sebagai manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2018)

Penelitian ini dapat memperkaya teori akuntansi, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, seperti transparansi, akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik. Kualitas laporan pemerintah mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Teori Pengendalian Internal (Arens dkk., 2020)

Menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif membantu dalam meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasioanl, memastikan kepatuhan terhadap peraturaan dan kebijakan serta dapat meminimalkan risiko kesalahan yang memiliki peran penting dalam proses pelaporan keuangan. Penelitian ini menguji secara

empiris relevansi teori ini dalam konteks pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Teori Akuntansi Berbasis Akrual (Mardiasmo, 2018)

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mendukung teori akuntansi berbasis akrual dengan mengkaji penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan yang andal, relevan, transparan dan akuntabel. Sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif merupakan landasan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transaparan dan akuntabel.

d. Teori Kompetensi Sumber Daya Manusia (Serdamayanti, 2017)

Menurut teori ini, kompetensi sumber daya manusia yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap adalah kunci untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Penelitian ini mendukung teori tersebut dengan mengevaluasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kinerja organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis digunakan untuk memberikan solusi nyata untuk masalah yang dihadapi di lapangan dan menghasilkan rekomendasi yang dapat di implementasikan oleh pihak terkait untuk memperbaiki situasi tertentu (Sugiyono, 2018). Manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penulis dapat menyerap ilmu secara langsung pada bidang yang diteliti serta dapat membantu mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pengalaman diri sendiri serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang penelitian dan ilmu pengetahuan yang didapat selama di bangku kuliah di aplikasikan.

b. Bagi Dunia Pendidikan/Akademis

Dapat bermanfaat untuk memahami teori sebagai bahan referensi dan tambahan informasi bagi Mahasiswa dan Mahasiswi dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dapat membantu pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem pengendalian internal, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian umumnya mencakup beberapa bagian utama seperti, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, pembahasan dan penutup. Sistematika penulisan ini memberikan alur logis dan memudahkan pembaca memahami isi penelitian (Sugiyono, 2018).

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang berbagai Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang Desain Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Populasi Dan Sampel Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pengumpulan data, hasil analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka sebagai lembar untuk menuliskan identitas sumber referensi yang sudah digunakan dalam menjalankan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri